BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal periode reformasi pasca pemerintahan orde baru berakhir muncullah gagasan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. Sistem sentralisasi yang dianut oleh pemerintah orde baru dianggap tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas, sehingga daerah memiliki tugas yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan (Rusydi et al., 2022). Sehingga melahirkan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 terkait dengan Pemerintah Daerah, kemudian undang-undang Nomor 25 tahun 1999 terkait dengan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi di Indonesia.

Melalui kebijakan desentralisasi memungkinkan daerah mengatur urusan daerah serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah tanpa intervensi dari pemerintah pusat. Di Indonesia, desentralisasi terbagi menjadi: (1) Politik; (2) Administrasi; (3) Fiskal; (4) Ekonomi (Puspita et al., 2021).

Pelaksanaan desentralisasi akan memberikan hasil yang maksimal jika didukung oleh kapasitas fiskal daerah yang cukup (Rusydi et al., 2022). Di Indonesia, salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam menunjang kemampuan fiskal daerah yaitu melalui transfer dana yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah. Mengacu pada undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer serta pendapatan sah lainnya. Penerimaan transfer terbagi menjadi tranfer yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat serta transfer antar daerah. Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat meliputi (1) Dana perimbangan; (2) Dana otonomi khusus; (3) Dana Keistimewaan; dan (4) Dana Desa. Sementara itu, transfer antar daerah meliputi (1) Dana Bagi Hasil dan (2) Bantuan Keuangan. Setiap tahun alokasi dana transfer yang disalurkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat jumlahnya terus mengalami peningkatan (Hardianto et al., 2024).

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi dari total 38 Provinsi yang ada di Indonesia yang memperoleh dana transfer ke daerah dan desa dari pemerintah pusat dimana Provinsi Jambi secara administratif terdiri dari Sembilan Kabupaten serta dua kota. Berikut adalah total realisasi dana transfer ke daerah dan desa yang disalurkan untuk Provinsi Jambi

Tabel 1. 1 Nilai Realisasi Transfer ke Daerah dan Desa Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

Tahun	Realisasi TKDD (Dalam Jutaan Rupiah)
2020	2.864.253
2021	2.886.045
2022	2.581.052
2023	2.663.452

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.1 Nilai Realisasi Transfer ke Daerah dan Desa Provinsi Jambi berdasarkan data publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 2020 memperoleh dana transfer sebesar Rp 2.864.253.000.000, kemudian pada tahun 2021 jumlah yang diterima Provinsi Jambi mengalami peningkatan menjadi Rp 2.886.045.000.000, sementara pada tahun 2022 jumlah dana transfer yang diterima provinsi jambi jumlahnya turun menjadi Rp 2.581.052.000.000 dan pada tahun 2023 jumlah dana transfer yang diterima Provinsi Jambi kembali meningkat menjadi Rp 2.663.452.000.000.

Pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang menerima dana transfer secara umum besaran dana transfer yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota jumlahnya terus mengalami peningkatan, dimana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten/Kota yang menerima dana transfer dari pemerintah pusat dengan jumlah terbesar pada tahun 2023 jumlah dana Transfer yang diterima Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp 1.624.986.000.000, sementara Kota Sungai Penuh menjadi Kabupaten/Kota dengan jumlah penerima dana transfer terendah dengan jumlah realisasi hanya sebesar Rp 652.536.000.000 pada tahun 2023. Berikut merupakan total realisasi dana transfer yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Tabel 1. 2 Nilai Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2020-2023

Kabupaten / Kota	Realisasi TKDD (Dalam Jutaan Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
Batang Hari	989.771	1.092.265	1.127.216	1.258.634
Bungo	1.015.194	987.830	1.074.936	1.059.615
Kerinci	1.026.440	1.022.975	1.038.611	1.125.487
Merangin	1.147.595	1.143.139	1.139.572	1.224.498
Muaro Jambi	1.109.797	1.156.901	1.179.307	1.282.270
Sarolangun	976.697	975.889	1.084.464	1.150.960
Tanjung Jabung Barat	1.198.304	1.311.721	1.514.681	1.624.986
Tanjung Jabung Timur	917.484	997.532	1.033.939	1.067.090
Tebo	897.439	957.780	1.052.526	1.056.115
Kota Jambi	1.076.304	1.081.056	1.104.243	1.086.393
Sungai Penuh	668.549	644.628	663.077	652.536

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.2 Nilai Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Desa masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi terdapat tujuh Kabupaten/Kota yang menunjukkan kondisi fluktuatif selama periode 2020 sampai dengan 2023, sementara empat Kabupaten/Kota menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yaitu Kabupaten Batang Hari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo. Peningkatan dana transfer ke Daerah dan Desa ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan guna memperkuat daerah (Puspita et al., 2021).

Secara umum pembangunan dapat dilihat sebagai usaha yang dilakukan dengan sadar dan terstruktur untuk mencapai perubahan yang lebih baik (Tan, 2021). Pembangunan seharusnya dipahami sebagai suatu proses multidimensi, bukan sekedar fokus pada aspek ekonomi tetapi juga meliputi perubahan dalam struktur sosial, perilaku dan institusi (Kuncoro, 2006). Lebih lanjut (Wahyuningsih, 2020) mengungkapkan fenomena pembangunan yang berkembang di era ini adalah meningkatnya fokus pada pendekatan terhadap model pembangunan manusia. Model pembangunan manusia (*people centred development*) muncul sebagai

tanggapan terhadap kegagalan model pembangunan yang mengutamakan pada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang merata .

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu parameter untuk mengafirmasi tingkat capaian pembangunan dengan membandingkan status pembangunan sosial ekonomi melalui tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan serta kemampuan memperoleh hidup layak. Indeks ini mencoba memberikan peringkat terhadap hasil pembangunan dimulai dari nol dalam menggambarkan tingkat pembangunan terendah sampai 100 menggambarkan tingkat pembangunan manusia tertinggi. Terkait dengan pengelompokan capaian Indeks Pembangunan Manusia, Badan Pusat Statistik mengelompokkan indeks tersebut kedalam empat kategori, yaitu kategori rendah bagi daerah dengan IPM dibawah 60, kategori sedang bagi daerah dengan IPM antara 60 hingga 70, kategori tinggi bagi daerah dengan IPM antara 70 hingga 80 serta kategori sangat tinggi bagi daerah dengan IPM di atas 80 (Badan Pusat Statistik, 2024).

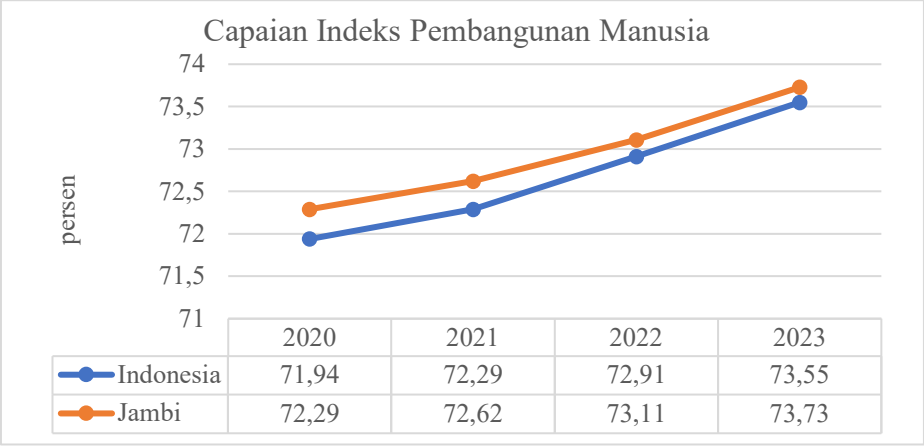

Gambar 1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dan bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian Indeks Pembangunan Manusia secara nasional, dimana pada tahun 2020 capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi tercatat di angka 72,29 sementara nasional berada di angka 71,94, selanjutnya pada tahun 2021 capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi meningkat di angka 72,62 dan nasional nasional berada di angka 72,29 kemudian pada tahun 2023 capaian Indeks

Pembangunan Manusia Provinsi Jambi tercatat di angka 73,11 sementara nasional masih berada di angka 72,91 dan pada tahun 2023 capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kembali meningkat di angka 73,73 sementara nasional berada di angka 73,55.

Peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia yang dicapai Provinsi Jambi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa program pembangunan yang pelaksanaanya dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan pengaruh yang besar, terutama program-program pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari transfer dana ke daerah dan desa. Dana transfer ke Daerah dan Desa memiliki peranan penting dalam upaya pelaksanaan pembangunan suatu daerah menurut (Syah & Soelistyo, 2022) Dana Desa mampu mempengaruhi komponen Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan masih banyaknya penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan. Sekitar 60% penduduk Provinsi Jambi masih tinggal di wilayah pedesaan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Jambi yang tinggal di pedesaan sebanyak 2.402.703 jiwa sementara yang tinggal diperkotaan sebanyak 1.228.433 jiwa dari total 3.631.136 jiwa, selanjutnya Dana Desa yang juga berperan dalam peningkatan pembangunan suatu daerah dimana dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, sarana pendidikan dan kesehatan yang dapat menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Manggala & Yulianty, 2024). Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah sebagai bentuk dukungan berbagai program pembangunan, seperti program kesehatan pendidikan, kesehatan. Serta kesejahteraan sosial Hutagaol et al., (2024)

Peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia yang terjadi di Provinsi Jambi tidak sepenuhnya merata di seluruh Kabupaten/Kota. Di beberapa wilayah capaian tersebut masih terletak dibawah rata-rata provinsi dan nasional. Diantaranya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang capaian Indeks Pembangunan Manusia masih berada dalam kategori sedang yakni berada di angka 60-70 hal ini mengindikasikan program-program

pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya memberikan dampak yang merata di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

Tabel 1. 3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2020-2023

Kabupaten / Kota	IPM			
	2020	2021	2022	2023
Batang Hari	69,84	70,11	70,51	71,02
Bungo	69,92	70,15	70,55	71,06
Kerinci	71,21	71,45	71,99	72,54
Merangin	69,19	69,53	69,98	70,81
Muaro Jambi	69,18	69,55	70,18	71,04
Sarolangun	69,86	70,25	70,89	71,29
Tanjung Jabung Barat	67,54	68,16	68,79	69,35
Tanjung Jabung Timur	64,43	64,91	65,77	66,65
Tebo	69,14	69,35	69,78	70,63
Kota Jambi	79,19	79,12	79,58	80,15
Sungai Penuh	75,42	75,70	76,17	76,65

Sumber : BPS Provinsi Jambi (diolah)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui seberapa besar dampak transfer dana ke daerah serta desa yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dalam mendukung otonomi daerah dan desentralisasi serta program pembangunan di daerah. Studi ini memanfaatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator ukuran keberhasilan dari program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dengan judul penelitian **Pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023.**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang oleh peneliti, berikut rumusan permasalahan yang ditetapkan oleh peneliti:

1. Bagaimana perkembangan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, Dana Desa, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan serta Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Bepedoman pada rumusan permasalahan yang ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, penelitian bertujuan untuk :

1. Menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, Dana Desa, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
2. Menganalisis pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

1.3.2. Manfaat penelitian

Berdasarkan temuan dalam studi ini, peneliti berharap dapat diperoleh manfaat berkaitan dengan program pembiayaan bagi dari daerah dari pemerintah pusat. Diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Berdasarkan akademis diharapkan berdasarkan temuan dari studi ini memberi manfaat bagi mahasiswa atau tenaga pendidik guna melakukan penelitian selanjutnya berkenaan dengan topik dan permasalahan penelitian terkait.
2. Berdasarkan praktis diharapkan berdasarkan hasil dari studi ini bisa menjadi sumber pengetahuan serta rekomendasi kebijakan bagi Lembaga-lembaga yang bersangkutan.